BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Cipta Karya Film Pada Sistem Elektronik Telegram Di Indonesia

Dasar hukum merupakan norma hukum yang berfungsi sebagai landasan untuk setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Dasar hukum dapat terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memastikan keadilan, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan agar sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan terhadap setiap warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu pula dengan negara Indonesia, yang berkewajiban untuk melindungi setiap warganya di mana pun mereka berada.

a. Pasal 1 ayat (3)

Berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal ini menegaskan bahwa sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau individu tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁵

Makna dari pasal ini mencakup beberapa poin penting. Pertama, setiap individu berhak diakui sebagai subjek hukum, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui keberadaannya serta hak-haknya di hadapan hukum. Dalam hal ini, pencipta karya, seperti film, memiliki hak cipta yang harus diakui dan dilindungi oleh negara.

Kedua, jaminan dan perlindungan hukum yang adil menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum. Saat terjadi pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan karya film, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan guna melindungi hak-hak pencipta dan menyediakan sarana bagi mereka untuk memperoleh keadilan.

Ketiga, kepastian hukum yang adil mengindikasikan bahwa setiap orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum, baik sebagai pelapor, terdakwa, maupun saksi. Dalam pelanggaran hak cipta, penting bagi semua pihak baik pencipta yang melaporkan pelanggaran maupun pelanggar yang diadili untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan bahwa “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat

⁵⁵ Salahudin Tunjung Seta, *Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2020.

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.

a. Pasal 25

- 1) Kegiatan pengedaran film dilaksanakan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film.
- 2) Pelaku kegiatan pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 3) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Pengaturan ini sangat penting karena saat sebuah film diproduksi, hak cipta atas karya tersebut menjadi milik pencipta atau produser. Apabila film tersebut didistribusikan tanpa izin atau melalui cara yang melanggar hukum, seperti pembajakan, maka pelanggaran hak cipta akan terjadi. Oleh karena itu, para pelaku pengedaran film harus memastikan bahwa mereka memiliki izin yang sah untuk mendistribusikan karya tersebut, agar tidak merugikan pencipta dan industri perfilman secara keseluruhan.

b. Pasal 49 huruf (c)

Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu maupun pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perfilman memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan ini sangat penting karena memberikan kepastian bahwa pencipta dan produser film dapat memperjuangkan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum, para pencipta film memiliki alat untuk menjaga karya mereka dari tindakan pembajakan dan penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif secara finansial dan reputasi.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berlandaskan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan beberapa ciptaan yang

dilindungi, termasuk karya sinematografi yakni karya seni yang berbentuk gambar bergerak, oleh karena itu film masuk ke dalam karya sinematografi yang perlu dilindungi. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁵⁶

a. Pasal 5

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapuskan dengan alasan apapun yang bersifat non-ekonomis, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain.

Hak moral ini meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya serta hak untuk mempertahankan integritas dari karya tersebut. Dalam pelanggaran hak cipta film, hak moral sangat penting karena memberikan perlindungan kepada pencipta untuk memastikan bahwa karya mereka tidak diubah atau disalahgunakan tanpa izin dari mereka.

b. Pasal 8

Pasal 8 menyebutkan bahwa “Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan”. Hak ekonomi berkaitan dengan penggunaan suatu ciptaan untuk tujuan komersial. Karya cipta merupakan hasil dari pemikiran intelektual seseorang yang dihasilkan melalui usaha, termasuk pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dan dipasarkan, hak ekonominya akan muncul atau melekat pada ciptaan tersebut.

Pelanggaran hak ekonomi terjadi ketika film didistribusikan atau ditayangkan tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pembajakan film yang diunggah dalam sistem elektronik Telegram, merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian besar bagi pemilik karya serta mengancam kelangsungan industri

⁵⁶ Thifal Afifah Ridwan, Siti Malikhatun, dan Adya Paramita, *Perlindungan hak cipta karya buku, musik, dan sinematografi*, Notarius, 2021.

perfilman, karena dalam proses pembuatannya mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit.

c. Pasal 9 ayat (3)

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Pasal ini menegaskan bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan penggandaan atau pemanfaatan ciptaan tanpa izin dianggap ilegal atau melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun yang ingin menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan film untuk tujuan komersial wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 1 butir (1) menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau lebih kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (*email*), telegram, teleks, faksimili, atau bentuk sejenisnya, termasuk huruf, simbol, angka, kode akses, tanda, atau perforasi yang telah diproses dan memiliki makna atau dapat dipahami oleh pihak yang dapat memahaminya”. Sedangkan Pasal 1 butir (2) menjelaskan “Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁵⁷ Berikut ini Pasal dalam UU ITE yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:⁵⁸

⁵⁷Dslawfirm, *UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat*, <https://www.dslawfirm.com/id/uu-ite/>, diakses pada 28 Februari 2025.

⁵⁸Artika Surniandari, *UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime*, Cakrawala-Jurnal Humaniora, 2016.

a. Pasal 15

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengelola Sistem Elektronik dengan cara yang andal dan aman, serta bertanggung jawab atas operasional Sistem Elektronik sesuai dengan sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Penyelenggara sistem elektronik seperti Telegram memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konten yang diunggah di platform mereka tidak melanggar hak cipta. Apabila penyelenggara sistem elektronik tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran konten ilegal, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.

b. Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, serta karya intelektual yang terdapat di dalamnya, dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa film yang diunggah dan disebarakan tanpa izin dalam Telegram merupakan pelanggaran hak cipta, mengingat film tersebut merupakan karya intelektual yang dilindungi.

c. Pasal 32 ayat (1)

Perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.

Menurut KBBI, transmisi berarti tindakan menyampaikan pesan dan informasi dari satu individu ke individu (atau benda) lainnya. Penyiaran film secara ilegal melalui media sosial termasuk telegram, merupakan bentuk transmisi data secara elektronik yang termasuk dalam kategori pelanggaran yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Oleh karena itu, kegiatan menyebarkan film secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (1) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa sistem yang dikelolanya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Artinya sebagai penyelenggara sistem elektronik, Telegram memiliki tanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa sistem yang dikelolanya tidak mengandung atau mendukung penyebaran dokumen elektronik yang dilarang, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang seimbang, sehingga fungsi positifnya dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Perlindungan Hak Cipta atau Hak Terkait muncul secara otomatis sejak ide pertama kali diwujudkan atau diterapkan dalam wujud yang nyata. Artinya, baik Hak Cipta maupun Hak Terkait yang dicatat maupun yang tidak dicatat memiliki kekuatan hukum yang setara. Pencatatan tersebut hanya bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian atau berfungsi sebagai bukti awal apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Pasal ini menegaskan ketika terjadi pelanggaran, maka pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut, termasuk yang dilakukan melalui sistem elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang serius mengenai perlindungan hak cipta, serta menyediakan mekanisme untuk penegakan hukum.

Pasal 2 ayat (3) berbunyi "Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk tujuan komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau yang menyebabkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait." Pasal ini menegaskan bahwa pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan

pemilik Hak Terkait, yang mencerminkan dampak serius dari tindakan tersebut.

Bila dikaitkan dengan Teori Negara Hukum, teori ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang seharusnya berlandaskan pada hukum dan konstitusi. Melalui berbagai peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara menegaskan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya intelektual. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, segala aktivitas termasuk pemanfaatan teknologi digital, harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Maka untuk mewujudkan teori negara hukum tersebut, terdapat tiga aspek utama yang harus dicapai, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Keadilan harus dirasakan oleh setiap individu dalam masyarakat, tanpa terkecuali. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Keadilan ini mengacu pada hak setiap pencipta karya, termasuk para pembuat film, untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya mereka dari tindakan pembajakan atau distribusi ilegal. Ketika film-film tersebut disebarluaskan secara ilegal pada sistem elektronik seperti Telegram, hal ini merugikan para pencipta dan industri film secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang adil dan setara dalam menangani pelanggaran hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa para pencipta mendapatkan hak mereka dan tidak dirugikan oleh tindakan ilegal.

Kepastian hukum merujuk pada adanya aturan yang jelas, sehingga setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya. Kepastian hukum dalam hal ini berhubungan dengan adanya peraturan yang jelas dan

tegas mengenai hak cipta serta konsekuensi bagi pelanggar. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta menyediakan kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap suatu karya cipta. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat termasuk pengguna Telegram, dapat memahami dampak dari tindakan ilegal seperti pembajakan film.

Kemanfaatan berhubungan dengan sejauh mana hukum dan kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perlindungan yang efektif terhadap hak cipta tidak hanya bermanfaat bagi para pencipta, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri film. Dengan mengurangi praktik pembajakan, industri film dapat berkembang menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan hiburan berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta dalam sistem elektronik Telegram akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri kreatif, serta meningkatkan kualitas karya yang tersedia untuk publik.

B. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Film Pada Sistem Elektronik Telegram Di Indonesia

Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah langkah atau usaha untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak selaras dengan peraturan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga setiap individu dapat menjalani hidupnya dengan harkat dan martabatnya. Secara umum, perlindungan hukum bertujuan untuk memperkuat tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat.⁵⁹

Perlindungan hak cipta tidak mencakup ide dan gagasan, karena suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan mencerminkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan, kreativitas, atau

⁵⁹ Aylia Munadiah, *Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

keahlian. Dengan demikian, karya tersebut bisa diakses secara visual dan auditori.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah suatu hak eksklusif. Hak eksklusif ini memberikan wewenang untuk memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya, sesuai dengan batasan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum hak cipta pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan, dengan membatasi pihak lain yang tidak memiliki izin untuk turut menikmatinya. Hukum berperan dalam melindungi monopoli semacam ini serta mencegah pihak lain untuk mengambil keuntungan atas ciptaan tersebut secara tidak adil. Dengan adanya monopoli ini, pemilik hak cipta dapat menikmati hasil dari jerih payahnya tanpa adanya gangguan yang dapat merugikan kepentingannya.⁶⁰

Film adalah salah satu bentuk media hiburan yang berkembang di masyarakat. Keberadaan media hiburan ini sering kali diiringi dengan praktik pembajakan film, yang bentuknya semakin bervariasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi Telegram sangat berbeda dibandingkan dengan pembajakan melalui situs online. Situs online cenderung lebih mudah terdeteksi karena sifatnya yang publik. Sebaliknya, pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi Telegram melibatkan pembajak yang membuat grup *chat* sebagai sarana untuk mengirimkan *file* video film, yang hanya dapat diakses oleh anggota grup tersebut. Hal tersebut membuat deteksi terhadap tindakan ilegal pembajakan menjadi sangat sulit.

Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum ini antara lain adalah pencipta film, karena royalti yang seharusnya mereka terima melalui pemegang hak cipta tidak memberikan pemasukan kepada mereka.

⁶⁰ Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm. 2.

Royalti adalah sejumlah pembayaran yang ditujukan kepada pembuat film, seperti hak paten dan hak cipta. Tujuan dari perlindungan karya film adalah untuk mencegah pihak lain menggunakan hasil ciptaan seseorang secara ilegal demi kepentingan mencari keuntungan. Maka dari itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi terhadap penciptaan karya seseorang.⁶¹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pasal 9 mengatur bentuk perlindungan hukum secara preventif, yang menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tanpa persetujuannya demi kepentingan komersial.⁶²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah mengambil tindakan melalui pengaturan undang-undang. Dengan demikian, perlindungan preventif ini lebih fokus pada upaya pencegahan.⁶³

Karya sinematografi termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m ini mendefinisikan karya sinematografi sebagai ciptaan yang berbentuk gambar bergerak, seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat

⁶¹ Navtaly Duestyn, Sarah Selfina, dan Marselo V.G.P, *Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Koreografi Dalam Kegiatan Komersil*, KANJOLI Business Law Review 2.2, 2024.

⁶² Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, (et.al), *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Komunitas Yustisia, 2021.

⁶³ *Ibid*, hlm. 6.

diproduksi dalam berbagai format, termasuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan media lainnya yang memungkinkan untuk ditampilkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau platform lainnya. Sinematografi adalah salah satu contoh dari bentuk karya audiovisual.⁶⁴ Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terhadap karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi, perlindungan terhadap film tentunya mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hak cipta, perlindungan terhadap ciptaan diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yaitu sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga karya tersebut secara otomatis memperoleh perlindungan hukum yang mencakup hak moral dan hak ekonomi.

Perlindungan pelanggaran hak cipta film dalam segi preventif dapat berupa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Upaya tersebut diwujudkan dalam dibuatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa untuk mencegah pelanggaran hak cipta melalui media berbasis teknologi informasi, Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten yang melanggar hak cipta;
- b. Kerja sama serta koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam mencegah pembuatan dan penyebaran konten yang melanggar hak cipta;
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan yang berlangsung di tempat pertunjukan.

⁶⁴ Muhammad Kemal F, Komang F.D, Muhamad Jodi S, *Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3.4 58-65, 2023.

Pemilik hak cipta berhak mengajukan pengaduan kepada Kementerian Hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta mereka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu “Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Hak Cipta dan/atau Hak Terkait yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri”. Pasal 55 ayat (2) “Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Setelah diproses akan dibuat berita acara, kemudian laporan diterima dan disertai dengan penyerahan barang bukti berupa tangkapan layar (screenshot) dari saluran Telegram yang berisi film tersebut. Selanjutnya Pasal 55 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya bukti yang cukup, maka atas permintaan dari pelapor, Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten dalam sistem elektronik yang terbukti melanggar Hak Cipta atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.⁶⁵

Pelaporan pelanggaran hak cipta juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam Pasal 2 peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara penyampaian laporan terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran terhadap Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab dalam bidang hukum. Laporan tersebut dapat diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, pemegang lisensi Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, lembaga

⁶⁵ Fachri Muhammad, Raditya Permana, Diana Mutia H, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal*, *Mavisha: Law and Society Journal* 1.1, 2024.

Manajemen Kolektif nasional atau Lembaga Manajemen kolektif, asosiasi yang mendapatkan kuasa, dan pihak lain yang diberikan kuasa.

Pasal 3 menjelaskan bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan cara elektronik maupun nonelektronik. Secara elektronik, laporan dapat disampaikan melalui situs *website* e-pengaduan.dgip.go.id yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkuham. Laporan yang diajukan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, yaitu::

- a. Identitas pelapor;
- b. Bukti kepemilikan hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait;
- c. Alamat situs yang terkait;
- d. Jenis dan/atau nama konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
- e. Jenis pelanggaran;
- f. Keterangan tambahan terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.⁶⁶

Selain itu, harus juga disertai dokumen-dokumen seperti:

- a. Fotokopi identitas pelapor;
- b. Fotokopi bukti kepemilikan hak;
- c. Dokumen alamat situs;
- d. Dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
- e. Surat kuasa jika laporan diajukan melalui perwakilan atau kuasa; dan
- f. Dokumen lain yang terkait.

Selanjutnya, untuk laporan yang disampaikan secara non-elektronik, pelapor harus mengisi formulir dan menyerahkannya secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, disertai dengan dokumen-

⁶⁶ Tim Visi Yustisia, *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*, VisiMedia, Jakarta, 2015.

dokumen yang diperlukan. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan administratif untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Laporan yang memenuhi syarat akan diregistrasi, sementara yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pelapor dan dianggap ditarik kembali. Selanjutnya, Kementerian Hukum akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregistrasi. Jika dalam proses verifikasi ditemukan bukti yang cukup, menteri akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta di saluran-saluran Telegram. Jika bersifat mendesak, penutupan saluran-saluran di Telegram dapat dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 jam. Sementara itu, jika situasinya tidak mendesak, penutupan saluran di Telegram akan dilakukan dalam waktu paling lama 5x24 jam.⁶⁷

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya meredam pembajakan konten termasuk film, dengan memblokir situs-situs *streaming* film ilegal. Total 1.745 situs dan konten termasuk di dalamnya film ilegal, yang diblokir Kominfo pada periode 2017 hingga 2019.⁶⁸ Dilansir dari *website* resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyebutkan bahwa Kemenkominfo telah memblokir akses pada 22 situs yang menayangkan film secara ilegal atau bajakan. Situs yang diblokir yaitu Ganool.com, Nontonmovie.com, Bioskops.com, Ganool.ca, Kickaas.to, Thepiratebay.se, Downloadfilmbaru.com, Ganool.co.id, 21filmcinema.com, Gudangfilm.caa.im, Movie76.com, Isohunt.to, Cinemaindo.net, Bioskop24.net, Unduhfilm21.net, Bioskopkita.com, Downloadfilem.com, Comotin.net, Movie2k.ti, Unduhmovie.com, dan 21sinema.com. Akses pada 22 situs tersebut diblokir berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 tahun

⁶⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020.

⁶⁸ Antaranews, *Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan*, <https://www.antaranews.com/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesia-terhadap-pembajakan>, diakses 25 Februari 2025.

2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.⁶⁹

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui penutupan saluran-saluran film yang telah dilaporkan di Telegram yang dilakukan oleh Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual melalui pendidikan di sekolah-sekolah atau komunitas. Pengawasan di bioskop juga diperketat dengan penggunaan CCTV, serta diimbau agar penonton mematikan handphone dan tidak merekam film yang sedang diputar. Selain itu, sanksi tegas akan diberikan kepada individu yang melanggar ketentuan tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku dan memulihkan hak-hak korban. Dalam perlindungan hukum yang bersifat represif, pemilik hak cipta tidak dapat mengajukan keberatan karena kasus tersebut akan langsung ditangani oleh lembaga administrasi atau pengadilan umum. Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran ini yaitu Pengadilan Niaga.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat cara penyelesaian sengketa hak cipta, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.⁷⁰

a. Secara Perdata

⁶⁹ Komdigi, 22 *Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo*, <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo>, diakses pada 25 Februari 2025.

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Ketentuan mengenai upaya perdata telah diatur dalam Pasal 96 – Pasal 104 Undang-Undang Hak Cipta.⁷¹ Berdasarkan Pasal 99 ayat (1), pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta, baik itu pencipta maupun pemegang hak cipta, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 99 ayat (2) menyebutkan bahwa “Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa permintaan agar pihak yang melanggar hak cipta menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari kegiatan seperti ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan bahwa selain mengajukan gugatan, pencipta ataupun pemegang hak cipta juga dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan terhadap ciptaan yang telah diumumkan atau digandakan tanpa izin, serta alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan yang melanggar hak cipta. Selain itu, mereka juga dapat meminta penghentian kegiatan pengumuman, distribusi, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.⁷²

Hak cipta adalah hak eksklusif yang memuat hak moral dan hak ekonomi, jika terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Dalam gugatan ini, mereka harus menyertakan semua bukti yang sesuai terkait pelanggaran tersebut. Gugatan ini bertujuan untuk meminta agar pelaku menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh akibat pelanggaran tersebut. Ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan harus dibayarkan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan dikeluarkan.

⁷¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, hlm. 70.

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.Cit*, Pasal 99

Beberapa dokumen yang perlu disiapkan yaitu surat kuasa, identitas pencipta atau pemegang hak cipta, surat pencatatan hak cipta atau bukti kepemilikan hak cipta.

Pasal 100 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan terkait tata cara untuk mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut:⁷³

- 1) Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga
- 2) Gugatan tersebut dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
- 3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan bukti penerimaan yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan pendaftaran gugatan.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- 5) Pengadilan Niaga akan menentukan hari sidang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak gugatan didaftarkan.
- 6) Juru sita bertanggung jawab untuk memberi pemberitahuan dan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Putusan pengadilan niaga harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Jika batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari dapat dilakukan dengan persetujuan dari Mahkamah Agung. Setelah itu, juru sita akan menyampaikan putusan pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.

⁷³ Tim Visi Yustisia, *Op Cit*, hlm. 35-36.

b. Secara Pidana

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, jika penyelesaian dilakukan secara perdata terlebih dahulu, putusan tersebut tidak akan menghapus hukuman pidana. Artinya, pelaku pelanggaran hak cipta film di Telegram masih bisa dikenakan tuntutan pidana. Dalam hal perlindungan pidana, pembajak film dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 113 ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selanjutnya Pasal 113 ayat (4) memperjelas akibat hukum yang diterima oleh pelaku tersebut yaitu menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.⁷⁴

Selain yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, akibat hukum lainnya juga diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.⁷⁵ Pasal 32 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara

⁷⁴ Rida Ista Stepu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022.

⁷⁵ Firmansyah Yogatama, Abdul Atsar, *Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi Loklok*, Commerce Law, 2024,

apa pun mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Salah satu contoh kasus pembajakan film yang terjadi yaitu pembajakan film Keluarga Cemara karya Visinema Pictures yang telah diunggah secara ilegal oleh Aditya Fernando dalam saluran yang bernama DUNIAFILM21 pada tahun 2020. Tindakan Aditya tersebut menyebabkan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian finansial yang seharusnya mereka terima sebagai hasil keuntungan dari hak cipta yang dimiliki. Keuntungan ini berupa royalti, yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk hak terkait.

Aditya telah melanggar Pasal 113 ayat (3), juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan telah divonis 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Selain itu juga dikenakan denda Rp. 500.000.000,- dengan syarat jika tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan kurungan selama satu bulan.

c. Penetapan Sementara Pengadilan

Penetapan sementara adalah putusan yang diajukan sebelum suatu kasus resmi dibawa ke pengadilan. Penetapan sementara dikeluarkan sebelum terjadinya perselisihan, sehingga berbeda dengan putusan sela, yang merupakan keputusan yang diminta setelah kasus utama mulai disidangkan.

Pemilik hak cipta yang mengalami kerugian dapat meminta Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 - Pasal 109 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa berdasarkan permintaan pihak yang haknya dirugikan akibat pelanggaran hak cipta, maka Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- 1) Menghindari masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur distribusi;
- 2) Menarik barang dari peredaran, menyita, dan menyimpannya sebagai bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait;
- 3) Mengamankan barang bukti dan memastikan barang tersebut tidak dihilangkan oleh pelanggar;
- 4) Menghentikan tindakan pelanggaran untuk menghindari kerugian yang lebih besar.⁷⁶

Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, permohonan untuk penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Menyertakan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait;
- 2) Menyertakan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait;
- 3) Melampirkan keterangan yang rinci mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
- 4) Melampirkan pernyataan yang mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan menghilangkan barang bukti;
- 5) Membayar jaminan dengan besaran jumlah yang sebanding terhadap nilai barang yang akan dikenakan penetapan sementara.

⁷⁶ Tim Visi Yustisia, *Op.Cit*, hlm. 36.

Permohonan yang sudah memenuhi syarat diserahkan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu 1x24 jam. Setelah itu, ketua Pengadilan Niaga akan menunjuk seorang hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Dalam waktu 2 hari setelah penunjukan, Pengadilan Niaga akan memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Jika permohonan penetapan sementara diterima, hakim akan mengeluarkan penetapan sementara dari pengadilan. Setelah penetapan tersebut sah secara hukum, uang jaminan yang telah dibayarkan akan dikembalikan.

d. Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara yang disetujui oleh semua pihak, yaitu dengan menyelesaikannya di luar pengadilan. Dasar hukum arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷⁷ Metode yang bisa digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa yaitu:⁷⁸

1) Konsultasi

Konsultasi merujuk pada suatu tindakan yang bersifat pribadi antara seorang klien dan seorang konsultan. Dalam proses ini, konsultan memberikan pendapat dan saran kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan klien tersebut.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah cara bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk membahas penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengevaluasi kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan mencari solusi yang saling menguntungkan, dengan

⁷⁷ Resi Atna Sari Siregar, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Islamic Circle 2.1, 2021.

⁷⁸ Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada 20 Maret 2025.

memberikan kelonggaran pada hak-hak tertentu berdasarkan prinsip timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

3) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral dan tidak berpihak, untuk membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela mengenai masalah yang disengketakan.

4) Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan dengan melibatkan satu atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) yang berperan sebagai penengah, yang disebut konsiliator. Mereka bertugas untuk mempertemukan atau memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih agar dapat menyelesaikan perselisihan secara damai. Konsiliator secara aktif berpartisipasi dalam memberikan solusi untuk masalah yang diperdebatkan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase harus mengeluarkan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan sengketa selesai. Jika ada kesalahan administratif dalam putusan, para pihak memiliki waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dikeluarkan untuk meminta

perbaikan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Putusan ini dapat dilaksanakan setelah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke panitera Pengadilan Negeri. Setelah pendaftaran, ketua pengadilan negeri memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.⁷⁹

Bila dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum sebagaimana telah dijelaskan menurut **Satjipto Rahardjo** yaitu upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, serta perlindungan tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum mencakup berbagai berbagai langkah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari pihak mana pun.

Teori tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap film yang disebarluaskan secara ilegal melalui sistem elektronik Telegram, merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang tersebut telah mengatur perlindungan terhadap karya sinematografi film, pada kenyataannya perlindungan tersebut belum mampu memberikan rasa aman bagi para pencipta, karena banyak hasil karya mereka masih mengalami pembajakan, terutama dalam sistem elektronik Telegram.

Teori keadilan dapat dipahami sebagai landasan moral yang bersifat normatif dan berkaitan erat dengan konstitusi hukum. Secara umum, konsep keadilan berupaya untuk memastikan pemerataan hak dan kewajiban yang seimbang (*equal*). Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat.

⁷⁹DJKN Kemenkeu, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>, diakses 01 Maret 2025.

Pada kenyataannya, perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang semestinya diperoleh. Keadilan yang diinginkan oleh masyarakat belum terwujud, terlihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan film secara ilegal yang terjadi secara luas, terutama pada sistem elektronik seperti Telegram.⁸⁰

Telegram sering dimanfaatkan sebagai platform untuk streaming film ilegal karena memiliki kapasitas penyimpanan yang mencapai 2 GB, sehingga memudahkan pengguna untuk mengunggah file berukuran besar, termasuk film dalam versi utuh. Fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi Telegram, seperti grup, saluran (channel), dan sistem bot, mempermudah pengguna dalam berbagi informasi. Selain itu, Telegram juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna menemukan berbagai konten film ilegal, mulai dari drama Korea, film Barat, hingga film lokal, melalui berbagai kanal yang tersedia di aplikasi pesan instan ini.

Kelemahan dalam menangani masalah pembajakan film tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap korban pelanggaran ataupun pemilik ciptaan tersebut, di mana mereka telah berusaha menciptakan karya, akan tetapi tidak dapat menikmati hak ekonomi dari hasil ciptaannya. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakadilan, di mana seharusnya keadilan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama saat terjadi pelanggaran.

Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa tidak ada penyelesaian yang memadai yang dapat memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun korban dari pelanggaran tersebut. Teori keadilan yang ditekankan akan memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat, tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat khususnya para pencipta karya yang masih merasakan ketidakadilan dan merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi.

⁸⁰ Ujang Badru Jaman, Galuh R.P, Tiara Azzahra A, *Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021.